

Abstrak

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, mengenai pelaksanaan swatantra wilayah, maka terjadi perubahan yang fundamental pada pengelolaan keuangan wilayah. Otonomi wilayah merupakan kewenangan yang dimiliki wilayah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan kehendak sendiri menurut aspirasi masyarakat, sinkron menggunakan peraturan UU yang berlaku. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) pada mengelola keuangan daerahnya, diantaranya merupakan menggunakan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan buat menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan Memakai analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, dan Rasio Efisiensi PAD. Penelitian ini adalah penelitian naratif kualitatif menggunakan objek yang diteliti merupakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada Rasio Derajat Desentralisasi diperoleh rata-rata 36,90% (cukup), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diperoleh rata-rata 46,72% (tinggi), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli diperoleh rata-rata 81,36% (kurang efektif), Rasio Efisiensi PAD diperoleh rata-rata 11,79% (Efisien).

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan APBD, APBD